



## Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak

Nanda Koernia Pratama<sup>1)</sup>, Dita Fisdian Adni<sup>2)</sup>

Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

[nandakoerniapratama@student.uir.ac.id](mailto:nandakoerniapratama@student.uir.ac.id)<sup>1)</sup>  
[ditafisdianadni@so.ac.id](mailto:ditafisdianadni@so.ac.id)<sup>2)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas kegiatan reses yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Siak Daerah Pemilihan 1 dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dari hasil penelitian yang didapat baik pada kegiatan di lapangan maupun wawancara dengan beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa : Kegiatan reses ini merupakan kegiatan anggota DPRD di luar sidang dengan tujuan menyerap aspirasi dari masyarakat untuk di jadikan sebuah kebijakan pemerintah daerah. Masa reses mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD yang dilaksanakan paling lama enam hari kerja sebagai salah satu ajang bertemunya secara resmi antara anggota DPRD dan konstituen.masa reses oleh anggota DPRD secara perorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat secara, secara teknis kegiatan sudah berjalan dengan efektif. Disisi lain dari beberapa indikator dari efektifitas Menurut David Krech dalam Danim (2012:119- 120) kegiatan yang dilakukan juga sudah efektif apalagi dengan bantuan dari pihak pemerintah desa yang juga antusias dalam menyikapi pelaksanaan kegiatan tersebut, tetapi adapun beberapa hal yang masih menghambat antara lain masih kurangnya sosialisasi politik kepada masyarakat karena masih banyak yang belum mengetahui kegiatan reses tersebut, dan masih banyak juga masyarakat yang mengira kegiatan reses itu merupakan sebuah kampanye politik, padahal kegiatan yang dilaksanakan memang murni dari kelembagaan DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat pada daerah pemilihannya masing-masing.

**Kata kunci:** Efektivitas, Reses, DPRD Kabupaten Siak

### Abstract

*This research was carried out with the aim of finding out the effectiveness of the recess activities held by the Siak Regency DPRD, Electoral District 1 using descriptive qualitative research methods. From the research results obtained both from activities in the field and interviews with several sources, it can be concluded that: This recess activity is an activity DPRD members outside the session with the aim of absorbing aspirations from the community to be made into regional government policy. The recess period follows the trial period which is held 3 (three) times a year or 14 recesses in the 5 year period of the DPRD term of office which are held no later than six working days as one of the occasions for official meetings between DPRD members and constituents. by DPRD members individually or in groups to visit their electoral districts to absorb people's aspirations. Technically, the activities have been running effectively. On the other hand, several indicators of effectiveness. According to David Krech in Danim (2012: 119-120), but there are several things that are still hampering them, including There is still a lack of political outreach to the public because there are still many who do not know about the recess activities, and there are still many people who think that the recess activities are a political campaign, even though the activities carried out are purely from the DPRD institution to absorb the aspirations of the people in their respective electoral districts.*

**Key words:** Effectiveness, Recess, Siak regency DPRD



## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 161 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan otonomi daerah disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan kewajiban anggota DPRD adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. (fajri ramadhani, 2024).

Kedudukan serta keberadaan lembaga perwakilan rakyat daerah mengandung arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintahan serta diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab. Seperti yang dirumuskan dalam UU 23 Tahun 2014, yang dengan kata lain bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang berperan sekaligus berkewajiban sebagai agen perubahan sosial. Dengan kata lain melalui kewajibannya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengembangkan kewajiban dasar sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak merupakan upaya peningkatan disegala bidang/aspek kehidupan, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka membangun kehidupan manusia seutuhnya. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah tidak lepas dari perencanaan yang terkoordinir, terpadu dan mempunyai strategi kebijakan yang tepat serta akurat sehingga pelaksanaan dapat mengarah pada tujuan dan sasaran yang jelas, objektif dan terukur sesuai visi dan misi Kabupaten Siak. Dalam melaksanakan perencanaan-perencanaan pembangunan yang terpadu dan hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka didalam perencanaannya perlu ada masukan, usulan yang merupakan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban DPRD diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti memilih salah satu kewajiban DPRD yaitu (1) "Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala" dengan melihat efektif tidaknya penyerapan aspirasi melalui reses. Tertarik memilih kewajiban ini karena pada kewajiban DPRD ini terdapat berbagai permasalahan serius untuk kepentingan masyarakat. Banyaknya anggota dewan yang hanya sebatas laporan tertulis yang disampaikan pada pimpinan dewan dan eksekutif, tindak lanjutnya tidak jelas ditambah lagi untuk publikasi kegiatan reses yang minim, sehingga masyarakat tidak bisa konfirmasi apakah aspirasi mereka dapat di tindak lanjuti atau tidak. Oleh karena adanya permasalahan-permasalahan serta hambatan dalam menyerap aspirasi masyarakat diatas akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap kewajiban DPRD yang dianggap tidak inspiratif. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengadakan penelitian terkait kewajiban DPRD dengan alokasi dana reses yang terbilang tinggi dalam tindak lanjut aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan konstitusional berkenaan dengan kewajiban sebagai wakil rakyat maupun kepentingan personal dan masing-masing partai anggota dewan melihat banyaknya anggaran dana untuk pelaksanaan reses. (Mutia et al., 2021)

Aspirasi selain dari masyarakat juga bisa dari hasil reses DPRD, dengan hasil kunjungan DPRD ke konstituen pada masing-masing daerah pemilihan yang bertujuan untuk menyerap, menghimpun, dan menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi dari hasil reses DPRD sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang terwakili oleh wakil rakyat. Hasil reses menurut Dwiyanto dkk (2003) adalah program dan kegiatan yang diusulkan DPRD yang dituangkan dalam APBD. (Mutia et al., 2021).

Masa reses merupakan bagian dari kegiatan diluar masa persidangan dan diluar gedung, masa reses mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD yang dilaksanakan paling lama enam hari kerja sebagai salah satu ajang bertemunya secara resmi antara anggota DPRD dan konstituen. masa reses oleh anggota DPRD secara perorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. (Mutia et al., 2021).

Kewajiban anggota DPRD salah satunya adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan

menindak lanjuti aspirasi masyarakat. Lebih lanjut kewajiban yang dimiliki anggota DPRD baik kabupaten/kota diantaranya adalah : (1) Mampu menyerap dan juga menghimpun setiap aspirasi dari aspirasi konstituen dengan melaksanakan kunjungan kerja secara berkala. Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD kabupaten/kota. (2) Anggota DPRD dapat menampung serta melakukan tindak lanjut dari aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dan (3) Anggota DPRD juga dapat mempertanggung jawabkan setiap tugas baik moral maupun politis kepada konstituen terutama di Daerah pemilihannya (Dapil).

Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna. Tujuan reses anggota DPRD adalah menyerap dan menindak lanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan (Zuhri, 2014 : 4).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 30 huruf (J) menyatakan Anggota DPRD mempunyai kewajiban yaitu menampung, menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Bertolak dari kewajiban DPRD sebagai menampung, menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Konsekuensinya adalah dalam membuat kebijaksanaan, lembaga-lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) haruslah senantiasa berlandaskan kepada kepentingan bersama atau untuk seluruh rakyat yang diwakilinya. (Mutia et al., 2021)

Kabupaten Siak merupakan bagian dari Propinsi Riau. Terdiri dari 14 kecamatan 8 kabupaten dan 121 Desa. Kabupaten Siak adalah hasil dari pemekaran Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999 dengan luas wilayah 8.556,09 km<sup>2</sup>. Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari kesultanan Siak Sri Indrapura. Diawal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Qasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. (Herda, 2022)

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Siak telah menetapkan jadwal pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat pada reses Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Siak masa sidang I reses I dilaksanakan pada tanggal 02 Desember s/d 06 Desember 2022, masa sidang II reses II dilaksanakan pada tanggal 01 Maret s/d 05 Maret, dan masa sidang III reses III dilaksanakan pada tanggal 27 Juli s/d 31 Juli 2023. Reses akan dilaksanakan sesuai Dapil masing masing. Demikian dikatakan Sekretaris DPRD. Ketua dan Anggota Dewan akan melaksanakan reses di seluruh daerah pemilihan yang ada Kabupaten Siak terbagi kedalam empat dapil. Dapil I terdiri dari Kecamatan Siak, Mempura, Bungaraya, Pusako, Sabak Auh dan Sungai Apit. Dapil II, Kecamatan Dayun, Koto Gasib, Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan, Dapil III, Kecamatan Tualang, Dapil IV, Kecamatan Minas, Kandis dan Sungai Mandau

Alasan penulis memilih lokasi penelitian ialah karena aspirasi masyarakat di kabupaten Siak dalam pelaksanaan kewajiban DPRD masih belum efektif dan maksimal, kurangnya keikutsertaan anggota DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada masyarakat, kurangnya komunikasi anggota DPRD kepada masyarakat sehingga masih banyaknya pembangunan dan infrastruktur yang belum merata.

Masyarakat di dapil 1 ini juga memiliki banyak keluhan terhadap kinerja pemerintah terhadap infrastruktur dan aksesibilitas. Masyarakat telah berulang-ulang melalui reses dewan untuk mengaspresiasi pembangunan dan pengaspalan jalan lingkungan. Oleh karena itu, dalam masa reses DPRD ini aspirasi yang disampaikan masyarakat membutuhkan pembangunan seperti semenisasi jalan di Desa Rawang Air Putih dan pembangunan parit, pembangunan PAM dan lainnya. Pembangunan-pembangunan di dapil ini akan sangat berpengaruh besar terhadap

pertumbuhan ekonomi Dipandang dari sudut kewajiban DPRD, maka DPRD dituntut lebih aktif dan dinamis dalam menjalankan serta melaksanakan tugas, wewenang dan kegiatan kearah realisisnya kewajiban. DPRD harus aktif melakukan hubungan dengan masyarakat atau kata lain harus melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka mencari dan menggali apa yang menjadi aspirasi rakyat yang diwakilinya supaya penyaluran aspirasi dapat terlaksana.

Belum efektifnya dan maksimalnya penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan peninjauan langsung (reses) oleh anggota DPRD Kabupaten Siak. Sehingga adanya aspirasi yang belum tersalurkan dan tidak masuk sebagai program kerja oleh anggota DPRD. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reses masih belum bisa membuat seluruh permintaan masyarakat di daerah Kabupaten Siak terwujud.

Selanjutnya kurangnya komunikasi masyarakat dengan anggota DPRD Kabupaten Siak sehingga menyebabkan minimnya public hearing (dengar pendapat) terhadap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan anggota DPRD dengan masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang belum menyampaikan aspirasi mereka, sehingga membuat anggota DPRD kesulitan dalam mencari solusi permasalahannya.

## METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi dari situasi yang terjadi, dengan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai latar belakang yang dialami, dan mengenai apa yang sedang terjadi. Pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan data-data yang diamati dilapangan. Dimana permasalahan yang akan diteliti tentang Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak. Penelitian kualitatif menjelaskan defenisi atau pengertian, konsep, makna, simbolisme, metofora, dan deskripsi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak, lokasi penelitian tersebut berdasarkan survey yang di lakukan, belum maksimalnya kegiatan peninjauan langsung (reses) yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Siak. Subjek yang di ambil dalam penelitian ini yaitu Kasubbag Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat, Anggota Partai politik atau anggota DPRD Siak, dan Masyarakat. Sumber data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang di gunakan peneliti melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jumlah Hasil yang Dikeluarkan.

Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ration) antara masukan (input) dengan keluaran (output), usaha dengan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwasanya mengenai Sub Indikator Hasil Aspirasi Masyarakat yang Ditampung dan Dikemas adalah kelompok sasaran pada kegiatan reses sangat menentukan keberlangsungan proses serap aspirasi. Kelompok sasaran yang selanjutnya menjadi peserta dalam kegiatan reses merupakan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang ada dilokasi dimana kegiatan reses dilaksanakan. Peserta yang mengikuti reses, biasanya berasal dari tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh agama atau orang yang punya peran penting pada masyarakat di desa atau kelurahan yang mana tempat dilaksanakan kegiatan tersebut, dapat juga perwakilan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun kepemudaan, kelompok tani, komunitas budaya, karang taruna, dan lain-lainnya. Yang terpenting semua tidak melebihi batasan yang sudah di tetapkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjadi wakil rakyat mempunyai peran penting untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, anggota DPRD dijadikan harapan agar dapat

menindaklanjuti aspirasi dari rakyat yang sudah ditampung dalam masa reses Anggota DPRD yang sudah di sahkan dalam paripurna DPRD, diharapkan hasil reses atau kunjungan kerja di masyarakat dari anggota DPRD dapat diimplementasikan sebagai regulasi atau kebijakan Pemerintah.

Selanjutnya hasil observasi yang telah dilakukan, masyarakat menilai kegiatan reses yang dilakukan Anggota Dewan sudah efektif, banyak keinginan masyarakat dari Desa maupun kelurahan untuk dapat dikunjungi, kegiatan Reses DPRD sangat diharapkan oleh masyarakat karena ingin bertemu dan menyampaikan secara langsung aspirasi maupun keluhan mereka kepada wakil rakyatnya. Anggota Dewan juga berusaha memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat

### **Tingkat kepuasan Yang Diperoleh**

Ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu). Tingkat kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat adalah perasaan senang, puas dengan pelayanan dikarenakan sesuai dengan apa yang di harapkan.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwasanya mengenai Sub Sarana dan Prasarana adalah Anggota Dewan yang melaksanakan kegiatan reses dari segi kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan reses yang disediakan untuk masyarakat sudah sangat optimal dan bagus. Masyarakat merasakan bahwasanya sarana dan prasarana yang disediakan sangat lengkap dan membuat masyarakat merasa nyaman saat mengikuti kegiatan reses.

Selanjutnya berdasarkan observasi yang telah dilakukan, fasilitas yang digunakan untuk kegiatan reses sudah sangat layak digunakan, spanduk yang digunakan juga baru dicetak, speaker masih berfungsi dengan baik, tenda juga masih bagus untuk digunakan, kursi yang dipakai juga disediakan lebih agar masyarakat tidak merasa kekurangan, alat tulis seperti (pena, spidol, kertas hvs) juga sangat lengkap disediakan oleh anggota staf reses.

### **Produk Kreatif**

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan. Melaksanakan beberapa program yang sifatnya meningkatkan sumber daya manusia, baik melalui program-program pelatihan ataupun penyuluhan, ada juga yang berbentuk fisik, yang sering terlihat adalah pembangunan infrastruktur.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwasanya mengenai Sub Program adalah bahwa DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Siak terutama di daerah pemilihan 1 kabupaten Siak, saat ini sudah sering melaksanakan beberapa program yang sifatnya meningkatkan sumber daya manusia, baik melalui program-program pelatihan ataupun penyuluhan, ada juga yang berbentuk fisik, yang sering terlihat adalah pembangunan infrastruktur, pemerataan dari program yang terealisasi masih tergolong kurang.

Selanjutnya dari hasil observasi yang telah dilakukan, program dari kegiatan reses ini terlaksana dengan baik, perbaikan jalan aspal diperbaiki, pembuatan infrastruktur jalan seperti semenisasi pada desa juga sudah terealisasikan. Anggota Dewan juga sering turun untuk melihat permasalahan yang ada pada masyarakat

### **Intensitas Yang Akan Dicapai**

Intensitas yang akan dicapai adalah mempunyai perasaan memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwasanya mengenai Sub Laporan Hasil Kegiatan Reses adalah Masyarakat sendiri dapat melihat secara langsung program yang sudah dilaksanakan, sedang Sekretariat DPRD dapat memantau dengan melihat laporan yang

sudah diberikan oleh anggota DPRD ataupun juga dapat melihat secara langsung. Setelah melaksanakan kegiatan reses, anggota DPRD Dapil 1 Kabupaten Siak tentu harus membuat laporan hasil dari kegiatan reses sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan (LPJ), laporan tersebut disusun sebagai alat bukti bahwa kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan dengan tujuan untuk laporan administrasi dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pada kegiatan selanjutnya. Disisi lain, laporan kegiatan bisa digunakan sebagai dokumen kegiatan yang telah dimasukkan ke dalam program perencanaan kerja. Dalam masa pelaporan hasil reses, anggota DPRD melaporkan hasil serap aspirasi mereka dalam bentuk lisan dan tulisan, hal ini dilakukan 3 kali dalam setiap masa reses dalam satu tahun. Pasca pelaksanaan, biasanya anggota DPRD melaporkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dan dibicarakan di kantor DPRD. Sementara itu, laporan berupa tulisan diserahkan pada sekretariat yang akan digunakan sebagai dokumen dan pertanggungjawaban dari anggota DPRD dalam kegiatan tersebut

Selanjutnya dari hasil observasi yang telah dilakukan, laporan hasil kegiatan reses ini sudah sangat baik, kegiatan reses yang dilakukan secara transparan, pencatatan setiap aspirasi dicatat langsung oleh staf anggota reses sebagai alat bukti kegiatan tersebut tujuannya ialah untuk laporan administrasi dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pada kegiatan selanjutnya. Anggota DPRD juga melaporkan hasil serap aspirasi mereka setiap 3 kali masa reses dalam setahun dalam bentuk lisan dan tulisan.

Berdasarkan keempat indikator yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Masyarakat yang mengikuti kegiatan reses, biasanya berasal dari tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh agama atau orang yang punya peran penting pada masyarakat di desa atau kelurahan yang mana tempat dilaksanakan kegiatan tersebut. Anggota DPRD dijadikan harapan agar dapat menindaklanjuti aspirasi dari rakyat yang sudah ditampung dalam masa reses Anggota DPRD yang sudah di sahkan dalam paripurna DPRD. Kepuasan masyarakat yang diperoleh dari segi kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan reses yang disediakan sudah sangat optimal dan baik. Masyarakat merasakan bahwasanya sarana dan prasarana yang disediakan sangat lengkap dan membuat masyarakat merasa nyaman saat mengikuti kegiatan reses. Anggota DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Siak terutama di daerah pemilihan 1, saat ini sudah sering melaksanakan beberapa program yang sifatnya meningkatkan sumber daya manusia, baik melalui program-program pelatihan ataupun penyuluhan, ada juga yang berbentuk fisik, yang sering terlihat adalah pembangunan infrastruktur, pemerataan dari program yang terealisasi masih tergolong kurang. Mengenai laporan hasil setelah melaksanakan kegiatan reses, anggota DPRD Dapil 1 Kabupaten Siak tentu membuat laporan hasil dari kegiatan reses sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan (LPJ), laporan tersebut disusun sebagai alat bukti bahwa kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan dengan tujuan untuk laporan administrasi dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pada kegiatan selanjutnya.

## **Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Efektifitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi dalam Efektifitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak sebagai berikut :

### **1. Faktor Pendukung**

#### **Adanya tuntutan atau aspirasi masyarakat.**

Dengan adanya tuntutan atau aspirasi dari masyarakat, Anggota Dewan mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat. Selain pemberian aspirasi dengan tujuan pembangunan lingkungan, tuntutan masyarakat juga dapat berupa pengawasan terhadap kinerja dari pemerintahan daerah sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah yang melaksanakan kebijakan sehingga tercipta suatu sistem pemerintahan yang baik.

## **Adanya Peraturan daerah**

Yang menjadi jawaban dari aspirasi masyarakat Ditambahkannya Raperda adalah rancangan perda yang penting dan urgent untuk segera diundangkan. Karena, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Raperda yang dikeluarkan merupakan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.

## **Sarana Dan Prasarana**

Pelaksanaan reses oleh anggota DPRD sangat didukung oleh sarana berupa fasilitas kerja yang memadai. DPRD Kabupaten Siak telah memiliki sebuah gedung representatif yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti ruang rapat sidang, ruang rapat komisi dan ruang rapat fraksi yang dilengkapi ruang perpustakaan dari ruang data, serta perlengkapan sidang yang cukup lengkap.

## **Adanya penjadwalan dan persiapan masa reses**

Tahun persidangan dalam DPRD Kabupaten Siak dimulai sejak bulan Desember 2022 dan berakhir pada bulan Juli 2023 berikutnya dan dibagi menjadi tiga masa persidangan meliputi masa rapat dan masa reses. adanya penjadwalan dan persiapan masa reses ini memudahkan anggota DPRD untuk melakukan tugasnya dan fokus dengan tujuan kegiatan yaitu menyerap aspirasi masyarakat.

## **2. Faktor Penghambat**

### **Proses Program (Lokasi yang sulit dijangkau)**

Tidak sedikit daerah terpencil yang belum menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan reses akibat sulitnya akses menuju suatu daerah terpencil. Kondisi jalan yang rusak menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan reses oleh DPRD sehingga mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat dari daerah terpencil atau pedesaan tidak tersalurkan, sedangkan daerah pedesaan merupakan daerah yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, karena banyak kasus-kasus atau masih banyaknya pembangunan yang tidak merata.

### **Tingkat Partisipasi masyarakat yang minim**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam hal ini dimaksud sebagai partisipasi masyarakat dalam membantu proses pembangunan dan realisasi dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang masih belum menyadari pentingnya reses.

### **Keterbatasan Anggaran**

Aspirasi yang telah ditampung oleh anggota DPRD sangat banyak sehingga tidak semua aspirasi masyarakat dapat tertampung di APBD yang menyebabkan beberapa dari aspirasi masyarakat tidak terwujud secara keseluruhan

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak dapat disimpulkan bahwa kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Siak sudah cukup efektif dalam melaksanakan kegiatan reses pada masyarakat Daerah Pemilihannya, mulai dari persiapan, perlengkapan, dan susunan acara dari kegiatan reses sudah tertata dengan baik. Anggota DPRD dijadikan harapan agar dapat menindaklanjuti aspirasi dari rakyat yang sudah ditampung. Kepuasan masyarakat yang diperoleh dari segi kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan reses yang disediakan sudah sangat optimal dan baik. Masyarakat merasakan bahwasanya sarana dan prasarana yang disediakan sangat lengkap dan membuat masyarakat merasa nyaman saat mengikuti kegiatan reses. Dengan usaha yang maksimal yang dilakukan oleh anggota dewan dan dukungan yang sangat tinggi dari pemerintah desa setempat Pelaksanaan reses di lakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kegiatan berjalan dengan lancar dan antusiasme dari masyarakat cukup tinggi dibuktikan pada saat acara masyarakat daerah tersebut sangat kompak dan bersemangat dalam menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada anggota dewan. Masyarakat masih banyak yang beranggapan kegiatan reses ini merupakan ajang untuk berkampanye dari calon



anggota legislatif, padahal ini adalah acara murni dari kelembagaan DPRD mewakili komisi untuk menampung aspirasi dari konsituennya di daerah pemilihannya masing-masing.

### Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan oleh penulis maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Daerah Pemilihan I agar lebih meningkatkan aksesibilitas untuk mempermudah lokasi kegiatan reses yang sulit dijangkau, dengan memperbaiki jalan yang berlubang dapat mempermudah akses menuju kegiatan reses.
2. Mengadakan sosialisasi saat peninjauan lapangan ke daerah konstituen, sosialisasi ini ditujukan agar masyarakat lebih paham tentang fungsi reses dan diharapkan masyarakat antusias dan hadir pada saat kegiatan reses berlangsung dilapangan, disamping itu anggota DPRD dapat mengarahkan masyarakat tentang bagaimana mengajukan aspirasi dan bagaimana mekanisme dalam mewujudkan aspirasi dalam masa reses.
3. Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak harus lebih menyediakan akses pendidikan politik yang merata dengan membentuk kebijakan seperti fasilitas dan sarana pendukung partisipasi, penyediaan ruang publik untuk diskusi politik, bahan-bahan informasi politik yang mudah diakses oleh masyarakat, serta peraturan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik.
4. Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak agar dapat memberikan dukungan finansial yang lebih kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Daerah Pemilihan I agar mereka dapat lebih memperjuangkan aspirasi masyarakat

### DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Pembaharuan.
- Agus Dwiyanto, et.al, 2003, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
- Alva Beriansyah, Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014 dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, Volume 2
- Aminudin Latief, 2014, Panduan Bagi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peran penting Sekretariat DPRD dalam mendukung trifungsi DPRD, Jakarta:ASDEKSI.
- Ari Cahyo Nugroho, Analisis Konten Terhadap Aspirasi Pembaca Terkait Isu Dana Aspirasi dalam Rubrik Suara Anda Harian Media Indonesia Edisi Juni 2010, Jakarta: 2011.
- Asmawi, 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang Undangan Pemerintahan Daerah Lembaga Legislatif Daerah, Jurnal Cita Bandung : Alfabeta
- A.W. Widjaja, 1993, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Jakarta: Bumi Aksara
- Badrika, I. N. A., & Sulandari, S. (2022). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TABANAN DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT. Jurnal Widya Publika, 10(2), 132-144.
- Baskoro, 2005. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan .
- Budiarjo dan Ambong , 1995. Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik. Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Burhan Bungin, 2012 Penelitian Kualitatif. Jakarta, Kencana Perdana Media Grup
- Carol C. Gould, 1994, Demokrasi Ditinjau Kembali, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dede Rosyada, 1993, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta:Rajawali Pers
- Dilla, I. U., Nasution, M. A., & Suriadi, A. (2020). Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan. GOVERNANCE:



- Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 6(4).
- Efriza, Studi Parlemen, Sejarah, 2014, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia, Malang: Setara Press
- fajri ramadhani, erry gusman, nessa. (2024). Efektivitas Kegiatan Reses Anggota Dprd Daerah Kab. Tanah Datar. *Otentik Law*, 2(3031–1624), 16–27.
- Goni, M. G., Nayoan, H., & Liando, D. (2019). Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014- 2019. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Hasmita. (2014). Program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan ageng tirtayasa 2014. 1–74.
- Hendra, J. (2017). Konsep dan Sistem Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia. UIN Suska Riau, *Demokrasi*, 11–27.
- Herda, A. (2022). Program pascasarjana universitas islam riau pekanbaru 2022.
- Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 380-395.
- Lolowang, P. J. (2022). Peran Anggota Dprd Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Minahasa. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 118- 129.
- Mardikanto dan Soebiato. 2013. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Miriam Budiardjo, 1995, Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Osbin Samosir. 2021. Sistem Perwakilan Politik di Era Modern. Jakarta: UKI Press.
- Patianfla, S. V. (2022). EFEKTIVITAS PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8n Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 pada pasal 27.
- Philippe Schmitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, *The Long Road To Democrac*, Jakarta : Habibie Center, 2004
- Pujiati, A. (2017). Analisa komparasi jumlah serapan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan reses. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 1(04), 1-10.
- Ramlan Surbakti. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rizka Azzahri, Seno Andri, & Adianto. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Niara*, 14(1), 266–275.
- RUHUDI, N. A. (2022). EFEKTIVITAS KEGIATAN RESES DPRD INDRAGIRI HULU DAERAH PEMILIHAN I (SATU) MASA BHAKTI 2019-2024 BERDASARKAN PERDA NOMOR 143 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DPRD INDRAGIRI HULU (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Sadu Wasistiono, 2009, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bandung: Fokusmedia
- Sanit, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali
- SA, T. D., Hananto, U. D., & Hardjanto, U. S. (2019). Pelaksanaan Tugas Anggota Dprd Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2797-2809.
- Schumpeter, Joseph A. (1994). *Capitalism, socialism, and democracy*. London ; New York:



Routledge.

- Sirait, L. P., & Afrindo. (2021). Metode Penelitian. Repository STEI. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta, 45.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D
- Sulistiani, S. K. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban DPRD Kabupaten Pelalawan Dalam Menampung Dan Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi Dan Civil Society, Yogyakarta : Graha Ilmu 2012
- Susanto, H., Ernungtyas, N. F., Prisanto, G. F., & Afriani, A. L. (2021). Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Kunjungan Kerja: Studi pada Masyarakat Provinsi Sumatera Utara (SUMUT 1). Jurnal Representamen Vol, 7(01).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Wasistiono, S. (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). fokusmedia.
- Wijaya, A., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Dan, S., & Riau, U. I. (2019). Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau. Peranan Dinas Kesehatan Indragiri Hilir Dalam Pengawasan Depot Air Minum Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, 1–122.
- Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Ed. III. Cet. III. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
- Yusri Munaf, 2016. Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau.
- Zuhriansyah, M. (2013). Penyerapan aspirasi masyarakat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada dinas cipta karya, permukiman dan perumahan (studi di desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan). Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal, 2(2).